

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kartu Prakerja: Transformasi Digital dan Terobosan Inklusi Keuangan Indonesia

Juni 2022

Elan Satriawan¹, Raden Muhamad Purnagunawan², I Gede Putra Arsana³,
Ekki Syamsulhakim⁴, Nurzanty Khadijah⁵, Eflina Sinulingga⁶, Martha Safitri⁷,
Rachmat Reksa Samudra⁸, Ben Satriatna⁹

Pandemi COVID-19 mempertegas pentingnya memiliki sistem pembayaran *Government-to-Person* (G2P) yang dapat menyalurkan bantuan sosial yang dibutuhkan kepada individu dan keluarga yang terkena dampak secara aman, terjamin, dan efisien. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menempatkan pembaruan digitalisasi serta integrasi program bantuan sosial dan subsidi secara strategis untuk memperkuat perlindungan sosial. Sebuah kajian yang mendalami pengalaman penerima bantuan sosial tanggap darurat COVID-19 diharapkan dapat menjelaskan apakah dan bagaimana model sistem pembayaran G2P yang terpusat pada penerima¹⁰ dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan saat ini dalam memaksimalkan manfaat kepada penerima dan program bantuan sosial G2P.

Oleh karena itu, Bank Dunia dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didukung oleh *G2Px Initiative Fund* dan *Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund* (IHCA-MDTF)¹¹, melakukan sebuah kajian untuk mempelajari implementasi bantuan sosial tanggap darurat COVID-19, memahami kecukupan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, dan mendukung reformasi lebih lanjut sistem pembayaran G2P. Walaupun kajian ini mencakup program-program unggulan bantuan sosial Pemerintah Indonesia: Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Sembako, dokumen ini hanya menyajikan hasil kajian Program Kartu Prakerja saja, karena analisis terhadap hasil kajian PKH dan Program Sembako masih berlangsung. Hasil keseluruhan studi akan tersedia pada akhir tahun 2022.

Diluncurkan pada bulan April 2020, Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial pertama di Indonesia yang diterapkan secara digital dan *end-to-end*, serta dengan mekanisme pembayaran G2P yang terpusat pada penerima. Kartu Prakerja memungkinkan penerima manfaat untuk memilih penyedia rekening transaksi (bank atau non-bank) dan jenis rekening (rekening bank atau uang elektronik)¹². Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan

^{1,2} Sekretariat TNP2K; ^{3,4,5,6,7,8,9} Bank Dunia

¹⁰ G2P yang terpusat pada penerima atau dikenal juga dengan G2P 3.0 adalah sebuah istilah yang digunakan mendeskripsikan sistem pembayaran G2P yang memungkinkan penerima untuk memilih berbagai pilihan saluran. Informasi lebih lanjut:

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2019_09_FocusNote_Future_G2P_Payments_0.pdf

¹¹ IHCA-MDTF didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation dan Tanoto Foundation

¹² Sesuai PBI No. 23/6/PBI/2021, terminologi teknisnya adalah uang elektronik berbasis *server* yang terdaftar atau *registered server-based electronic money*. Dalam istilah yang sederhana, uang elektronik atau e-money menggunakan

efisiensi bagi penerima manfaat, lembaga Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta pengelola program (pemerintah).

Penelitian tentang Kartu Prakerja ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei telepon dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada 1.000 penerima Kartu Prakerja di 50 kecamatan yang tersebar di 50 kabupaten dan 25 provinsi. Penerima manfaat ini terdaftar ke dalam program Prakerja untuk Gelombang 7-11 (atau terdaftar pada bulan September-November 2020). Dalam periode yang sama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola program (MPPKP atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dan lembaga PJP di tingkat pusat untuk mengkaji pengalaman mereka menerapkan sistem pembayaran G2P Kartu Prakerja saat ini, termasuk terobosan dan tantangan yang dihadapi. Untuk melakukan konfirmasi dan mendalami lebih lanjut hasil studi kuantitatif tersebut, tim peneliti juga melakukan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara mendalam dengan beberapa kelompok penerima manfaat Kartu Prakerja.

Pesan Kunci 1:

9 dari 10 responden telah menyelesaikan program Kartu Prakerja yang dimulai dari penerimaan hingga pemberian insentif pasca pelatihan.

Di antara mereka yang terpilih ke dalam program, 95,7% telah membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari. Sedangkan bagi peserta yang tidak membeli pelatihan dalam waktu yang ditentukan akan dicabut kepesertaannya sementara dana manfaat yang dialokasikan akan dikembalikan dan digunakan untuk gelombang berikutnya. Agar dapat menerima insentif pasca pelatihan, penerima Kartu Prakerja diharuskan untuk menyelesaikan pelatihan pertama dan menautkan rekening bank/uang elektronik mereka ke sistem Kartu Prakerja. Di antara mereka yang membeli pelatihan pertama atau disebut “penerima manfaat efektif”, 94,9% mengkonfirmasi telah menerima insentif pasca pelatihan. Selanjutnya, analisis dalam ringkasan eksekutif ini akan didasarkan pada pengalaman penerima manfaat efektif tersebut.

Lebih dari 6 dari 10 penerima manfaat menyatakan pertama kali mendengar program Kartu Prakerja dari keluarga, kolega, atau teman, sementara yang lainnya mendengar pertama kali dari media sosial dan berita. Sebagian besar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mendaftarkan dirinya dengan lancar (66,9%) dan dapat membeli pelatihan Kartu Prakerja dengan mudah (78,2%). Sebelum menerima Kartu Prakerja, 83,1% penerima manfaat mengaku belum pernah mengikuti pelatihan, baik secara luar maupun dalam jaringan.

Pesan Kunci 2:

Mayoritas responden menyatakan puas dengan pelatihan Kartu Prakerja pertama mereka. Mereka didorong oleh motivasi intrinsik dan/atau insentif pasca pelatihan dalam menyelesaikan pelatihan pertama mereka.

Sekitar 96,1% dari keseluruhan jumlah penerima Kartu Prakerja merasa puas dengan pelatihan pertama mereka. Sebagian besar penerima manfaat menyelesaikan pelatihan pertama untuk meningkatkan kompetensi atau tertarik dengan isi pelatihan (41,4%) dan/atau untuk menerima insentif pasca pelatihan (43,0%). Sekitar 79,9% dari seluruh penerima manfaat mengatakan bahwa mereka memilih pelatihan pertama mereka sendiri, sedangkan 21,1% lainnya memilih dipengaruhi

telepon genggam sebagai perangkat media dan membutuhkan proses *customer due diligence* (KYC) untuk mencatat informasi identitas pemilik rekening.

oleh anggota rumah tangga lainnya, kolega, atau teman. Secara rata-rata, penerima Kartu Prakerja membeli 1-2 pelatihan dengan dana manfaat yang diberikan, dengan topik yang umumnya terkait dengan sektor pekerjaan mereka.

Pesan Kunci 3:

Penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan.

Kajian ini juga menemukan bahwa 76,6% penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank. Kemudahan, kebiasaan, dan kepercayaan menjadi faktor utama dalam memilih jenis rekening yang akan digunakan. Bagi sebagian besar penerima manfaat, prosedur pembukaan rekening uang elektronik dianggap lebih mudah daripada membuka rekening bank. Penambahan uang elektronik dalam mekanisme pembayaran Kartu Prakerja juga memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa mayoritas penerima Kartu Prakerja (58,5%) baru pertama kali menggunakan uang elektronik (49,8%) maupun rekening bank (8,7%).

Desain program dan mekanisme pembayaran Kartu Prakerja yang inovatif telah membawa berbagai keuntungan bagi penerima manfaat, pemilik program, serta PJP. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa para penerima Kartu Prakerja merasa diuntungkan dengan proses *onboarding* yang mudah, penggunaan uang elektronik yang mendorong transaksi non-tunai, lebih banyak titik akses, serta keberadaan mekanisme pengaduan yang tersedia. MPPKP sebagai pemilik program juga mendapatkan keuntungan dalam implementasinya dalam bentuk proses *onboarding* yang lebih mudah dan intuitif, sistem monitoring dan evaluasi yang efisien, serta dukungan terhadap inklusi keuangan. Sementara itu, PJP Kartu Prakerja juga memperoleh tambahan pengguna baru, potensi *cross-selling*, penambahan titik akses baru, serta dorongan untuk berinovasi dalam layanan digital.

Pesan Kunci 4:

Sebagian besar penerima manfaat segera mencairkan insentif menjadi uang tunai setelah menerimanya di rekening mereka. Mayoritas responden menggunakan insentif untuk membeli makanan dan/atau untuk modal kerja.

Setelah insentif mencapai rekening pilihan, 69% penerima mencairkan seluruh insentif mereka, sementara 31% lainnya mencairkan hanya sebagian atau tidak mencairkannya sama sekali. Tidak adanya ekosistem digital yang mendukung dan preferensi penerima manfaat untuk menggunakan rekening lain (non-Kartu Prakerja) adalah beberapa penyebab rendahnya transaksi non-tunai di rekening bank/uang elektronik yang digunakan untuk menerima insentif pasca pelatihan. Sebagian besar penerima juga tidak mengalami kesulitan dan menghabiskan waktu yang relatif singkat saat mencairkan insentif. Secara keseluruhan, insentif pasca pelatihan digunakan untuk konsumsi pangan (74,2%), modal kerja (43,7%), dan/atau pembayaran tagihan (37,8%). Sekitar 96,4% penerima manfaat mengaku puas dengan metode pencairan non-tunai, tidak ada perbedaan antara pengguna Bank dan uang elektronik. Alasan utamanya adalah karena begitu cepatnya penerima manfaat menerima insentif setelah menyelesaikan pelatihan mereka.

Pesan Kunci 5:

Perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pasca pelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini.

Hampir 90% penerima manfaat menganggap bahwa Kartu Prakerja telah menyediakan cukup pilihan PJP. Namun, sebagian penerima manfaat lebih memilih untuk menggunakan rekening bank yang telah mereka miliki sebelumnya untuk menerima insentif pasca pelatihan. Menambahkan lebih banyak opsi penyedia rekening bank dapat membawa lebih banyak dampak positif, terutama untuk penggunaan rekening. Akan tetapi, penambahan PJP ke dalam ekosistem pembayaran Kartu Prakerja harus dievaluasi dengan teliti dengan mempertimbangkan semua biaya dan potensi manfaat. Penambahan satu penyedia rekening melalui bank swasta pada sistem pembayaran insentif pasca pelatihan Kartu Prakerja awal tahun ini menunjukkan perkembangan yang baik.

Implikasi kebijakan terhadap pemutakhiran pembayaran G2P di Indonesia

Pengalaman Kartu Prakerja memberikan banyak pembelajaran penting dalam pemutakhiran mekanisme pembayaran G2P di Indonesia. Kartu Prakerja adalah program pemerintah pertama yang mengimplementasikan sistem pembayaran G2P yang terpusat pada penerima dengan memperkenalkan beberapa inovasi baru. Inovasi ini termasuk implementasi program 100% secara digital *end-to-end* yang dimulai dari *onboarding* sampai pembayaran insentif. Hal ini mendukung pembayaran G2P skala besar secara cepat dan transparan. Kartu Prakerja juga memungkinkan penerima manfaat untuk memilih rekening transaksi terbaik yang mereka inginkan, berdasarkan pertimbangan lokasi, jangkauan layanan, dll. Perluasan opsi penyedia rekening, termasuk beberapa penyedia uang elektronik, juga mengizinkan ada kompetisi antara PJP yang dapat mendorong inovasi dan perbaikan layanan. Kartu Prakerja telah mengundang seluruh PJP (milik pemerintah dan swasta) yang tertarik untuk berpartisipasi dalam ekosistem pembayaran Kartu Prakerja. Perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank dapat meningkatkan penggunaan rekening bank.

Seperti program bantuan sosial transformatif lainnya, Kartu Prakerja memberikan akses rekening transaksi kepada penerima manfaat. Selain itu, Kartu Prakerja telah memberikan peluang yang lebih baik bagi penerima manfaat untuk mengakses Layanan Keuangan Digital. Sayangnya, akses tersebut belum dimanfaatkan secara penuh oleh penerima manfaat. Dalam hal ini, Kartu Prakerja perlu bekerja dengan berbagai pihak. Peluang yang telah diciptakan ini membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah dan pembuat kebijakan inklusi keuangan yang relevan. Dukungan ini dapat berupa penciptaan kasus penggunaan yang lebih banyak dan juga memberikan dukungan sehingga penggunaan pembayaran digital yang dinamis dapat tercapai. Terakhir, para pembuat kebijakan inklusi keuangan dapat berkolaborasi dengan penyedia pembayaran dalam menawarkan program literasi keuangan yang disesuaikan untuk penerima manfaat dan mendukung program pembayaran G2P seperti program Kartu Prakerja untuk mempromosikan inklusi keuangan lebih lanjut.

Mitra Penelitian



Didukung Oleh



Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Eflina Sinulingga di esinulingga@worldbank.org atau Nurzanty Khadijah di nkhadijah@worldbank.org.